

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI

#### A. Konsep Kesaksian

##### 1. Defenisi Kesaksian

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Keterangan atau pernyataan yang diberikan itu sudah tentu yang menjadi saksi adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang suatu peristiwa yang dilihatnya sendiri. Adapun pendapat atau dugaan yang diperoleh melalui berfikir tidak termasuk dalam suatu kesaksian.<sup>1</sup>

Berdasarkan deskripsi pengertian kesaksian di atas dapat dipahami bahwa kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh saksi, yakni orang yang melihat sendiri suatu peristiwa (kejadian) atau orang yang diminta hadir di depan hakim guna memberikan keterangan atau sebagai bukti kebenaran.<sup>2</sup>

Di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui suatu peristiwa kejadian atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui agar suatu ketika diperlukan

<sup>1</sup>Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, (Malang: Setara Press, 2015), h.6.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi.<sup>3</sup>

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Jika para saksi yang hadir diminta oleh para pihak yang mengadakan akad pernikahan agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang-orang, maka nikahnya tetap sah. Namun apabila tidak dihadiri oleh para saksi meskipun diumumkan ke khalayak ramai, maka hukum pernikahannya tidak sah.

Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Juga supaya suami tidak menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo.<sup>4</sup>

Syafi'i, Hanafi dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi.<sup>5</sup>

"Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi bapak menikahkan anaknya yang perawan, dan tidak boleh bagi wali selain bapak menikahkan perawan maupun janda yang sehat akal nya hingga terdapat empat unsur, yaitu; *pertama*, keridhaan dari wanita yang akan dinikahkan dan saat itu ia telah baligh. Adapun batasan

<sup>3</sup>Depdiknas, Tim Redaksi: Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 2002), h. 981.

<sup>4</sup>Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 146.

<sup>5</sup>Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terjem. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 447.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

baligh adalah telah mengalami haid (menstruasi) atau usianya telah cukup 15 tahun. *Kedua*, keridhaan laki-laki yang akan menikah dan saat itu ia telah baligh pula. *Ketiga*, wanita itu harus dinikahkan wali atau sultan (penguasa). *Keempat*, pernikahan ini disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Apabila pernikahan tidak memenuhi salah satu dari keempat unsur ini, maka pernikahan dianggap rusak (tidak sah)”.

Tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.<sup>6</sup>

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam akad nikah itu tidak wajib dan cukup diumumkan saja.<sup>7</sup>

“Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu yang diwajibkan dalam pernikahan. Menurut mereka pernikahan cukup dengan disebarkan dan diumumkan. Mereka mendasarkan pendapat mereka dari jual beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan praktik tersebut. Adapun kesaksian di dalam pernikahan yang tidak pernah disinggung langsung dalam quran akan lebih leluasa untuk tidak dijadikan sebagai salah satu hal pokok yang harus dipenuhi, karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab.”

<sup>6</sup>Muhammad Jawad Mughriyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 314.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010), h. 272.

Mereka beralasan bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika langsungnya jual beli. Sebagaimana tersebut di dalam Alquran bukan merupakan bagian dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi, Allah tidak menyebutkan di dalam Alquran tentang adanya syarat mempersaksikan dalam suatu pernikahan. Karena itu, tentu lebih baik jika masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum Kesaksian

Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Alquran dan beberapa Hadis Nabi SAW di antaranya Firman Allah Swt:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 99.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Bumi Restu, 1976), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hadis Nabi adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas menurut al-Tirmidzi:

حدثنا يوسف بن حماد المعنى البصري أخبرنا عبد الله بن علي عن سعيد بن قنادة,  
عن جبر بن يزيد, عن ابن عباس, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن  
انفسهن بغير بينة. (رواة الترمذي)<sup>10</sup>

Artinya: “Yusuf bin Hammad Al Ma’na Al Bashri menceritakan kepada kami, Abdul A’laa memberitahukan kepada kami dari Said dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas: sesungguhnya Nabi Saw bersabda : “Perempuan-perempuan yang zina adalah mereka yang menikahkan dirinya dengan tanpa saksi” (HR. At-Tirmizi).<sup>11</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun dari akad tersebut. Beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah, maka menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama dan diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad muamalah.<sup>12</sup>

Secara umum keberadaan saksi dalam akad nikah diterima oleh jumhur ulama, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat/pandangan terhadap masalah syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi sewaktu menjadi saksi nikah. Dalam KHI pasal 25, yang dapat ditunjuk untuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, aqil baligh, adil, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna

<sup>10</sup>Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz II*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikri, 1994), h. 298.

<sup>11</sup>Moh Zuhri, dkk, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, (Semarang: CV Asy-Syifa’, 1992), h. 430.

<sup>12</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 51.

rungu atau tuli. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan menurut penulis ialah disyaratkannya adil bagi saksi dalam pernikahan.

Mengenai disyaratkannya adil ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha. Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi. Artinya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang fasik hukumnya tetap sah.<sup>13</sup> Namun berbeda pendapat dengan dengan Imam Syafi'i, menurutnya saksi mengandung dua arti yaitu pengumuman dan penerimaan, jadi disyaratkan menggunakan saksi yang adil. Beliau mengatakan bahwa "Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang dilakukan akadnya dengan dihadiri dua saksi yang adil."<sup>14</sup>

Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya *Fath al-Qarib Al-Mujib* mengatakan: Tidak sah suatu akad pernikahan, kecuali dengan hadirnya dua saksi yang adil.<sup>15</sup>

"Saksi yang adil dan diridhai menurut jumhur ulama adalah: Orang muslim, mukallaf (dikenai kewajiban syara), merdeka, tidak mengerjakan dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil."<sup>16</sup>

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 274.

<sup>14</sup>Muhammad bin Idris Al Syafii, *Al-Umm*, h. 35.

<sup>15</sup>Syekh Al-Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib Al-Mujib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: Mukjizat, 2012), h. 119.

<sup>16</sup>*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mushannif menyebutkan bahwa keabsahan sebagai wali dan dua saksi membutuhkan enam syarat, yaitu:

1. Islam. Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Hambali menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat.<sup>17</sup>
2. Baligh/dewasa. Anak-anak tidak dapat dijadikan saksi, walaupun sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), karena kesaksiannya menerima dan menghormati pernikahan itu belum pantas.
3. Berakal sehat. Berakal sehat artinya orang yang mabuk atau gila yang tidak terkontrol akalnya tidak dapat dijadikan sebagai saksi.
4. Merdeka. Merdeka maksudnya bukan seorang budak/hamba sahaya.
5. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Hanafi dan Hambali dalam riwayat yang termasyur menyatakan bahwa kesaksian seorang wanita saja dapat diterima Maliki dan Hambali sepakat mengatakan kesaksian dengan dua orang wanita dapat diterima. Berbeda halnya dengan Syafi'i menyatakan tidak dapat diterima kesaksian perempuan, kecuali empat orang.
6. Laki-laki, merupakan persyaratan saksi dalam akad nikah. Demikian pendapat jumhur ulama selain Hanafiyah.

<sup>17</sup>Ibnu Elmi ASP dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian (Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama Islam)*, (Malang: Setara Press, 2015), h. 15

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. Saksi dalam akad nikah harus mendengar dan memahami ucapan ijab qabul antara wali dan calon pengantin laki-laki. Dan keharusan melihat, Syafi'iyah berpendapat saksi harus orang yang dapat melihat. Sedangkan jumhur ulama, mereka menerima kesaksian orang yang buta asal dia dapat mendengar dengan baik ijab qabul itu dan dapat membedakan suara wali dan calon pengantin laki-laki.
8. Adil. Saksi haruslah orang yang adil, walaupun adil tersebut hanya dapat dilihat dari lahiriyahnya saja. Demikian pendapat para jumhur ulama, selain Hanafiyah dan Malikiyah.

Adapun arti adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut istilah syara' adalah watak/tabiat dalam jiwa yang dapat mencegah diri dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.<sup>18</sup>

### 3. Fungsi Saksi Dalam Akad Nikah

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, sebagaimana di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, dan ayat 2 berbunyi: Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam

<sup>18</sup>Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Op, Cit*, h. 303.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.<sup>19</sup>

Tidak sahnya nikah dikarenakan tidak hadirnya saksi di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 26 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.<sup>20</sup>

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang saksi, apakah saksi itu merupakan suatu syarat saja ataukah sebagai rukun dalam perkawinan. Berarti mengandung maksud bahwa nikah itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya saksi walaupun pemberitahuan tentang adanya nikah itu dapat dicapai dengan cara yang

<sup>19</sup>Drs. Ahmad Rofik, M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 95

<sup>20</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>21</sup>Drs. Ahmad Rofik, M.A, *Op. Cit.*, h. 96

lain. Akan tetapi Imam Syafi'I menyatakan bahwa saksi itu sebagai rukun, sehingga setiap perkawinan harus disaksikan oleh kedua orang saksi.

Saksi nikah selain merupakan rukun nikah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang bakal terjadi di kemudian hari, apabila salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul tersebut, ia juga dimintai tanda tangannya dalam akta nikah pada waktu dan di tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan. Fungsi lain kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Abu Hanifah adalah informasi (*I'lan*) telah dilaksanakannya sebuah akad nikah.

Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai status saksi apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam akad nikah menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan saksi berakibat akad nikah tidak sah.<sup>22</sup>

## B. Konsep Keadilan

### 1. Defenisi Keadilan

Secara etimologi kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adil artinya “sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak”.<sup>23</sup> Kata ‘*adl*’ di dalam al-Qur’an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Kata *adil* disebutkan sebanyak 28 kali, kata *al-Qisṭ* sebanyak 25

<sup>22</sup> Ahmad Rofik, *Op. Cit.*, h. 97.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali, baik dalam bentuk kata kerja (*fi'il*), maupun kata benda (*isim*), kemudian kata *al-Wazn* disebutkan sebanyak 20 kali dalam bentuk kata kerja (*fi'il*) maupun kata benda (*isim*).<sup>24</sup>

Kata adil dalam *Ensiklopedia Al-Quran* diambil dari bahasa Arab yakni '*adl*', adalah bentuk *maṣḍar* dari kata kerja '*adala-ya'dilu- 'adlan-wa 'udulan- wa 'adalatan*'. Kata kerja ini berakar dari huruf-huruf '*ain, dal, lam*', yang makna pokoknya adalah *al-istiwa* (keadaan lurus) dan *al-i'wijaj* (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni "lurus atau sama" dan "bengkok atau berbeda".<sup>25</sup>

Dengan demikian banyaknya makna keadilan, penulis lebih memandang kepada adil dalam hal karakter. Artinya adil yang diinginkan ialah adil yang mengarah kepada akhlak yang lurus sesuai dengan aturan dan tuntunan agama Islam.

## 2. Syarat-Syarat Keadilan

Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya, "*Fath al-Qarib Al-Mujib*", mengatakan bahwa adil menurut bahasa adalah tengah-tengah. Sedangkan menurut syara' adalah watak/tabi'at dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan hina yang mubah.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat sifat adil menurut beliau ada lima macam, yaitu:

<sup>24</sup>*Ibid.*,

<sup>25</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 5.

<sup>26</sup>Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Op, Cit*, h. 303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menjauhi melakukan setiap dosa-dosa besar, seperti berzina dan membunuh orang lain tanpa hak.
2. Menjauhi melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus.
3. Dapat menjaga keimanannya dan tidak berbuat *bid'ah* yang dapat membawa kepada fasik dan kufur.
4. Menahan amarahnya dari perbuatan yang tercela.
5. Dapat menjaga harga diri dan kehormatannya.<sup>27</sup>

Sifat adil dalam ilmu fiqih merupakan syarat bagi seseorang yang akan bertindak sebagai saksi baik dalam akad ataupun masalah peradilan. Seperti dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau penguasa. Orang yang adil dalam pengertian seperti ini akan menjauhi larangan-larangan agama, tidak melakukan dosa-dosa besar dan kecil. Imam Syafi'i berpendapat bahwa adil berarti dapat dipercaya dalam bidang-bidang agama, benar berbicara dan tidak pernah berbohong. Akan tetapi, adil dalam pengertian ini bukan berarti orang yang memiliki sifat itu sama sekali bebas dari dosa, karena tidak ada manusia yang demikian terjaga.<sup>28</sup>

Berbicara mengenai sifat adil bagi seorang saksi, Soemiyati dalam bukunya "Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan", mengatakan bahwa:

<sup>27</sup>Ibid, h. 303-305.

<sup>28</sup>Tim Penyusun, *Suplemen Ensiklopedi Islam, Op., Cit*, h. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

“Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Syafi’i syarat adil bagi seorang saksi merupakan keharusan, sedang menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah”.<sup>29</sup>

Amir Syarifuddin berpendapat mengenai adil sebagaimana yang penulis kutip dalam bukunya yang berjudul “*Garis-Garis Besar Fiqih*”, ia menyebutkan: Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.<sup>30</sup>

Adil menurut Imam Syafi’i adalah orang saleh orang yang tidak fasiq, ia mensyaratkan seorang saksi harus memiliki sifat adil, jika seorang saksi tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak sah menjadi saksi nikah. Prof. Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam’ani, adil itu harus mencakupi empat syarat:

1. Memelihara perbuatan taat (amalan salih) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
2. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji.
3. Tidak mengerjakan yang halal yang merusak muru’ah (kesopanan).

<sup>29</sup> Ibid.,

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tidak mengi'tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara'.<sup>31</sup>

Teori keadilan relevan dengan penelitian penulis. Karena untuk memperjelas adil yang seperti apa yang disyaratkan bagi seorang saksi pernikahan, harus dipahami terlebih dahulu adil dalam hal apa yang digunakan. Hal itu terjadi karena luasnya makna keadilan.

### 3. Pendapat Empat Mazhab Tentang Kriteria Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, oleh sebab itu setiap pernikahan haruslah disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah.<sup>32</sup>

Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat nikah dilangsungkan, maka akibat hukumnya pernikahan tersebut tidak sah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 24 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 26 ayat (1).

Mengenai sifat adil bagi saksi dalam akad nikah di kalangan imam mazhab muncul berbagai pendapat yang bermacam-macam. Ada imam yang menyatakan

<sup>31</sup>Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 87.

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 6, 2003), h. 95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sifat adil merupakan syarat saksi dalam akad nikah, ada pula yang tidak mensyaratkan demikian. Berikut pendapat para imam tentang kriteria sifat adil:

**a. Pendapat Mazhab Hanafi**

Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, dan yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya akad.<sup>33</sup> Sebagaimana disebutkan juga oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* bahwa:

Para ulama Hanafiah berkata, “keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyah juga, karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja”.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Moh Abidun, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Akasara, 2010), h. 274.

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**b. Pendapat Mazhab Maliki**

Menurut Imam Malik, kehadiran saksi pada saat akad nikah tidak wajib.

Tetapi cukup dengan pemberitahuan (pengumuman) kepada orang banyak, bahwa akad nikah itu telah berlangsung seperti mengadakan resepsi perkawinan atau dengan cara yang lain. Namun Malikiyah tetap menganggap perlu pemberitahuan itu sebelum suami melakukan *dukhul* (persetubuhan). Sebagaimana disebutkan oleh Sayyid Sabiq dalam *Fikih Sunnah Jilid 6*:

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa: “Saksi dalam pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Alasan mereka yaitu bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an bukan merupakan bagian daripada ayat-ayat yang wajib dipenuhi dalam jual-beli. Padahal soal perkawinan ini Allah tidak menyebutkan di dalam Al Qur’an adanya syarat persaksian. Karena itu tentulah lebih patut kalau dalam perkawinan ini masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan, mempersaksikan ini boleh dilakukan sesudah ijab qabul untuk menghindari perselisihan antara kedua mempelai. Jika waktu ijab qabul tidak dihadiri oleh para saksi, tapi sebelum mereka bercampur kemudian dipersaksikan maka perkawinannya tidak batal, tetapi kalau sudah bercampur belum dipersaksikan maka perkawinannya batal”.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, alih bahasa Mohammad Thalib, (Bandung: Alma’arif, 1980), h. 87.



### c. Pendapat Mazhab Syafi'i dan Pendapat Mazhab Hanbali

Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama. Sebagaimana dikatakan Wahbah Az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* mengatakan bahwa adil adalah istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Keadilan ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi'i.<sup>36</sup> Oleh karena itu pembahasan mazhab Syafi'i disatukan dengan mazhab Hambali.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa perkawinan bukan hanya berkaitan dengan rukun akad nikah, tetapi melainkan keseluruhan dari segala unsur-unsurnya tanpa terkecuali permasalahan saksi. Saksi diwajibkan ada dalam akad nikah karena fungsinya yang penting untuk pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri, mencapai makna terbuka dan pengungkapan, dan juga sebagai penentu sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.

Selain syarat-syarat dua orang saksi seperti harus dua orang laki-laki, berakal, baligh, Islam, mendengar dan memahami maksud ucapan akad nikah, Imam Syafi'i mensyaratkan adil bagi saksi dalam akad nikah. Imam Syafi'I mengatakan:

“Apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Apabila terlihat seorang laki-laki masuk menemui seorang wanita, lalu

<sup>36</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jilid 9, h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita itu berkata, “Ia suamiku”, dan laki-laki tadi berkata, “Ia istriku, aku telah menikahinya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil”, maka pernikahan itu sah meski kita tidak mengetahui siapa dua orang saksi adil tersebut”.<sup>37</sup>

Adil menurut Imam Syafi’i adalah orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga *muru’ah* (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, yaitu:

1. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan pembunuhan.
2. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima
3. Orang yang adil itu selamat I’tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid’ah yang menjadi kufur atau fasiq dengan perbuatan bid’ahnya. Seperti orang yang ingkar akan adanya hidup setelah mati.
4. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat mencegah emosinya.
5. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang yang sepadannya.

<sup>37</sup>Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 447.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun dasar hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan ketentuan hukum tentang saksi adil dalam akad nikah adalah Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلِ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ

Artinya: “Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.<sup>38</sup>

## C. Konsep Keabsahan

### 1. Defenisi Keabsahan

Keabsahan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, berasal dari kata absah yang artinya sah. Keabsahan berarti sifat yang sah atau kesahan.<sup>39</sup> Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipil, karenanya perkawinan erat kaitannya dengan segala hal akibat perkawinan, baik menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 2, sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h. 115.

<sup>39</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (ed), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Serta KHI sebagai pedoman umat Islam dalam menetapkan hukum menjelaskan tentang sahnya suatu perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 yakni: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berbicara tentang keabsahan atau sahnya suatu perbuatan hukum tidak terlepas dengan yang namanya syarat. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam: syarat *in'iqad* (pelaksanaan).<sup>40</sup> syarat *sihah* (sah),<sup>41</sup> Syarat *nafas* (terlaksana)<sup>42</sup> dan syarat *luzuum* (kelanggengan).<sup>43</sup>

## 2. Syarat Keabsahan Pernikahan

Syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah dandiakui

<sup>40</sup>Syarat *in'iqaad*, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam dasarnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepakatan ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

<sup>41</sup>Syarat *shihhah*, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

<sup>42</sup>Syarat *nafaadz*, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat *nafaadz* ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiah akadnya *mauquf* (ditangguhkan).

<sup>43</sup>Syarat *luzuum*, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* 9, terjem. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 54.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara hukum sehingga berlaku hak dan kewajiban yang berkenaan dengan masalah pernikahan seperti hak dan kewajiban nafkah.<sup>44</sup>

Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepakatan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Objek cabang
- b. Mengekalkan shighat akad
- c. Persaksian
- d. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
- e. Menentukan pasangan
- f. Tidak sedang ihram haji dan umrah
- g. Harus dengan mahar
- h. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
- i. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan.
- j. Wali.<sup>45</sup>

Teori ini penulis gunakan karena sesuai dengan maksud dari penelitian yang dilakukan. Sebagaimana yang penulis uraikan di atas keabsahan suatu akad akan terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Namun jika syarat-syarat tersebut ada yang tidak dipenuhi, maka akadnya menjadi batal atau tidak sah.

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, terjem. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (tanpa kota: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 271.

<sup>45</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, terjem. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Akibat Hukum Sifat Adil Bagi Saksi Pernikahan Terhadap Keabsahan Akad Nikah.

Berkenaan dengan masalah keadilan bagi seorang saksi, Imam Hanafi mengatakan bahwa untuk menjadi saksi dalam pernikahan tidak disyaratkan harus orang yang adil. Jadi menurutnya, pernikahan yang disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak adil hukumnya tetap sah. Lain halnya dengan golongan Syafi'i dan Hambali, mereka sepakat bahwa saksi itu harus orang yang adil.

Selanjutnya mereka mengatakan bahwa apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukumnya tetap sah. Dengan alasan, karena perkawinan itu terjadi di berbagai tempat di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil dan kota, di mana ada orang yang belum diketahui adil tidaknya, jika harus mengetahui terlebih dahulu adil tidaknya seorang saksi hal ini akan memberatkan dan menyusahkan. Jadi, adil cukup dilihat dari lahirnya saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fasik, dan apabila ternyata di kemudian hari setelah terjadinya akad nikah diketahui kefasikannya, maka akad nikahnya tidak terpengaruhi berarti tetap sah.<sup>46</sup>

<sup>46</sup>Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut satu pendapat, pernikahan tetap sah mesti adil tidaknya saksi tidak diketahui dengan jelas, asalkan saksi itu telah jelas keislaman dan kemerdekaannya. Namun, bila kefasikan saksi itu baru tersingkap saat akad, menurut mazhab Syafi'i pernikahan jadi batal karena tidak adanya sifat adil yang dimiliki saksi. Kefasikan tersebut bisa diklarifikasi dengan bukti atau diketahui oleh kedua mempelai.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 459.